THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 31 PARAGRAPH (1) OF THE 1945 CONSTITUTION IN FULFILLING THE RIGHT TO EDUCATION FOR WOMEN IN TANJUNGSARI VILLAGE

¹Robiatul Fitriah, ²Yogi Nugraha, ³Nadya Putri Saylendra
^{1,2,3} Universitas Buana Perjuangan Karawang
Jalan HS Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Puserjaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang
¹pk20.robiatulfitriah@mhs.ubpkarawang.ac.id
²yogi.nugraha@ubpkarawang.ac.id
³nadya.saylendra@ubpkarawang.ac.id

(Received: 24 Juli 2025 / Accepted: 28 Juli 2025 / Published Online: 12 Agustus 2025)

ABSTRACT

Article 31 paragraph 1 of the 1945 Constitution states that every citizen has the right to education. However, in reality, not all girls have received their right to education fairly, especially in rural areas. Therefore, the purpose of this study is to examine the implementation of Article 31 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in fulfilling girls' right to education in Tanjungsari Village, Cilebar District, Karawang Regency. Using a qualitative descriptive approach through interview and observation techniques, this study involved 5 girls who had dropped out of school, 5 of their parents, and 1 village head as informants. The results show that although much infrastructure is available, the fulfillment of the right to education is not optimal. Of the 52 children who dropped out of school in 2023, 34 of them were girls. Economic factors are the main obstacle (limited costs), exacerbated by a patriarchal culture that considers higher education unimportant for women. The implementation of constitutional norms has not been optimal due to the absence of a systematic cooperation program between the village government and schools and the lack of structured socialization. These findings indicate the need for real intervention by the government, village officials, and families to ensure the fulfillment of girls' educational rights comprehensively and equally in accordance with the constitutional mandate.

Keywords: *Implementation of the constitution, right to education, girls, gender gap, village government*

ABSTRAK

Pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, Namun pada kenyataannya belum semua anak perempuan secara adil mendapatkan hak pendidikannya terutama di wilayah pedesaan. Oleh karena itu tujuan Penelitian ini adalah mengkaji implementasi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dalam pemenuhan hak pendidikan anak perempuan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui Teknik wawancara dan observasi. penelitian ini melibatkan 5 orang anak perempuan putus sekolah, 5 orang tuanya, dan 1 kepala desa sebagai informan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun banyak insprastruktur tersedia , pemenuhan hak Pendidikan belum optimal. Dari 52 anak yang putus sekolah pada tahun 2023, 34 di antaranya adalah anak perempuan. Faktor ekonomi menjadi kendala utama (keterbatasan biaya), diperparah oleh budaya patriarki yang menganggap pendidikan tinggi tidak penting bagi perempuan. Penerapan norma konstitusional belum optimal karena tidak adanya program kerja sama yang sistematis antara pemerintah desa-sekolah dan kurangnya sosialisasi yang terstruktur. Temuan tersebut menunjukkan perlunya intervensi pemerintah, aparat desa, dan keluarga yang nyata untuk memastikan pemenuhan hak-hak pendidikan anak perempuan secara komprehensif dan merata sesuai dengan amanat konstitusional.

Kata kunci : Implementasi konstitusi, hak pendidikan, anak perempuan, kesenjangan gender, pemerintah desa

I. PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai hak asasi manusia yang mendasar telah mendapat pengakuan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pendidikan" [1]. Ketentuan konstitusi ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya kebutuhan sosial, tetapi hak dasar yang harus dijamin untuk dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis gender. Namun, implementasi norma konstitusional ini dalam praktik di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, terutama dalam pemenuhan hak pendidikan anak perempuan.

Secara yuridis, jaminan konstitusional hak atas pendidikan telah diperkuat melalui berbagai peraturan pendukung. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 48 menetapkan bahwa "Perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan"[2]. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 menegaskan bahwa "Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas" [3]. Konstruksi hukum ini seharusnya memberikan perlindungan komprehensif untuk hak-hak pendidikan anak perempuan, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Permasalahan penerapan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dalam konteks pendidikan anak perempuan tidak lepas dari kompleksitas sosial budaya yang masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Konstruksi sosial yang berkembang di lingkungan dan budaya masih mengasumsikan bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu penting bagi perempuan, mengingat mereka diyakini hanya tinggal di ranah domestik. Paradigma ini bertentangan dengan semangat konstitusional yang menjamin persamaan hak tanpa membedakan gender, dan menciptakan tantangan tersendiri dalam implementasi norma-norma konstitusional di tingkat akar rumput.

Fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan tercermin dalam berbagai indikator empiris yang menunjukkan bahwa ada kesenjangan akses pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024 telah meningkat di semua jenjang pendidikan, dengan pola yang menunjukkan bias gender dalam akses pendidikan. Di tingkat SD, tingkat putus sekolah meningkat dari 0,17% menjadi 0,19%, sedangkan di tingkat SMP meningkat dari 0,14% menjadi 0,18%. Meskipun terjadi penurunan di tingkat SMA dari 0,20% menjadi 0,19%, pada tingkat SMK terjadi peningkatan yang signifikan dari 0,23% menjadi 0,28%.

Permasalahan penerapan norma konstitusional menjadi lebih nyata ketika diamati dalam konteks mikro di tingkat desa. Data dari Desa Tanjungsari menunjukkan realitas yang mengkhawatirkan terkait pemenuhan hak pendidikan anak perempuan. Pada tahun 2023, dari total 150 anak yang tidak melanjutkan sekolah, sebanyak 75 anak adalah anak perempuan, dibandingkan dengan 65 anak laki-laki. Distribusi berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa di tingkat sekolah dasar, 26 anak perempuan tidak melanjutkan sekolah dibandingkan dengan 20 anak laki-laki. Di tingkat SMP, kesenjangan ini semakin mengkhawatirkan dengan 34 anak perempuan tidak melanjutkan sekolah dibandingkan dengan 25 laki-laki, sedangkan di tingkat SMA, 25 anak perempuan tidak melanjutkan sekolah dibandingkan dengan 20 anak laki-laki [4].

Kompleksitas permasalahan implementasi konstitusi semakin terlihat dalam data putus sekolah di Desa Tanjungsari pada tahun 2023. Dari total 52 anak putus sekolah, 34 di antaranya adalah anak perempuan, hampir dua kali lipat jumlah anak laki-laki yang berjumlah 18 anak. Distribusi berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa pada tingkat SD, 8 anak perempuan putus sekolah dibandingkan dengan 5 anak laki-laki. Di tingkat SMP, angka ini meningkat menjadi 14 anak perempuan dibandingkan 7 anak laki-laki, sedangkan di tingkat

sekolah menengah atas, 12 anak perempuan putus sekolah dibandingkan 6 anak laki-laki [4]. Data empiris ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam implementasi jaminan konstitusional untuk hak-hak pendidikan anak perempuan.

Analisis faktor-faktor penyebab kegagalan penerapan norma-norma konstitusional menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang kompleks antara faktor ekonomi, sosial-budaya, dan struktural. Menurut informasi dari pemerintah desa setempat, faktor utama yang menyebabkan anak perempuan putus sekolah adalah pernikahan dini, faktor ekonomi yang mengharuskan mereka membantu orang tua mereka bekerja, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Hal ini berbeda dengan faktor-faktor penyebab putus sekolah pada anak laki-laki yang lebih didominasi oleh keharusan bekerja untuk membantu keluarga dan kurangnya minat belajar. Perbedaan pola ini menunjukkan adanya konstruksi sosial yang berbeda dalam memperlakukan anak berdasarkan gender, yang pada gilirannya menghambat implementasi norma konstitusional yang efektif.

Kompleksitas implementasi norma konstitusional ini juga terkait dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 2 menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus mengikuti prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghormatan terhadap anak [5]. Prinsip non-diskriminasi ini berhubungan langsung dengan penerapan jaminan konstitusional untuk hak anak perempuan atas pendidikan.

Dalam konteks penerapan norma konstitusional, peran negara sangat sentral sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Ayat (2) menetapkan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya," sedangkan ayat (3) menetapkan bahwa "Pemerintah wajib mengupayakan dan menata sistem pendidikan nasional yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa." Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak atas pendidikan bukan hanya kewajiban moral, tetapi kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara.

Berdasarkan analisis kompleksitas permasalahan penerapan norma konstitusional, penelitian ini relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dalam pemenuhan hak pendidikan anak perempuan di Desa Tanjungsari.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dalam pemenuhan hak pendidikan anak perempuan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks dalam konteks alami tanpa adanya manipulasi variabel [6].

Subjek penelitian ini terdiri 11 informan yaitu 5 orang anak perempuan putus sekolah yang berusia 17-20 tahun sebagai informan utama yang mempunyai pengalan langsung terkait fenomena yang di teliti, 5 orang tua anak putus sekolah, dan 1 Kepala Desa Tanjungsari. Pemilihan jumlah ini di dasarkan pada pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan kedalaman informasi daripada generalisasi. Jumlah subjek penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan pengalaman yang bermakna dan relevan dengan penelitian.

Selain itu data sekunder yang di dapat menunjukkan bahwa tahun 2023 terdapat 52 anak putus sekolah di Desa Tanjungsari, dimana 34 diantaranya adalah anak perempuan, hampir dua kali lipat jumlahnya dari pada angka anak putus sekolah laki-laki . Fakta ini menunjukkan bahwa

penomena yang diteliti bukan kasus terisolasi, melainkan kecenderungan yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun jumlah subjek penelitian ini terbatas, data ini mencerminkan kondisi nyata yang relevan untuk di analisis secara mendalam.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi yang meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi untuk memastikan validitas dan keandalan data [6]. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman [7], dengan tahapan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber dan metode, pengecekan anggota, deskripsi tebal, dan jejak audit untuk memastikan kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan konfirmasi temuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di Desa Tanjungsari tentang bagaimana implementasi pasal 31 ayat 1 UUD tahun 1945 di Desa Tanjungsari maka hasilnya diuraikan sebagai berikut:

1). Analisis Implementasi Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945

Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, implementasinya di desa Tanjungsari masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa bapak Junaidi mengatakan akses pendidikan sudah tersedia dan jarak sekolah dekat sehingga mudah dijangkau dengan jalan kaki, tetapi hak tersebut belum dapat dinikmati oleh anak perempuan yang putus sekolah karna faktor ekonomi. Sebagian besar informan orang tua tidak mengetahui isi pasal secara spesifik. Mereka tahu pendidikan adalah hak semua orang tetapi tidak mengetahui bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pasal 31 ayat (1) di Desa Tanjungsari belum sampai pada kesadaran hukum di masyarakat.

2). Faktor Penghambat dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak Perempuan

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga di Desa Tanjungsari terbukti menjadi penyebab utama anak perempuan tidak melanjutkan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kamung dan anaknya Wulan mereka mengatakan bahwa anaknya berhenti sekolah karna tidak ingin menjadi beban di tengah kondisi ekonomi yang sulit anaknya Wulan memilih untuk berjualan, narasumber memaparkan bahwa sekolah butuh biaya sementara penghasilan orangtuanya terbatas. Kepala Desa Tanjungsari bapak Junaidi juga menyampaikan bahwasanya persoalan ekonomi menjadi penyebab utama anak perempuan putus sekolah di Desa Tanjungsari.

b. Faktor Budaya dan Stereotip Gender

Pandangan budaya masih sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak perempuan, banyak keluarga dan masyarakat [8] yang masih menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga [9], [10]. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Epong dan anaknya Rahma mereka bilang bahwasanya perempuan cukup bisa mengaji dan memiliki pengetahuan dasar karena pada akhirnya mereka akan mengikuti suaminya. Dan hal ini diperkuat oleh pernyataan kepala desa yang menyatakan masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya pendidikan bagi anak perempuan karena budaya setempat masih ada saja yang menganggap perempuan berbeda dengan laki-laki.

c. Kurangnya Dukungan Struktural Dari Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa bapak Junaidi bahwasanya akses sekolah sudah cukup memadai tetapi belum ada program khusus antara pemerintah desa dan sekolah tapi untuk memotivasi orang tua pihak desa lakukan dengan cara sosialisasi .

3.) Peran Masyarakat dan Pemerintah Desa Tanjungsari dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak Perempuan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam menjamin hak pendidikan anak perempuan di Desa Tanjungsari masih terbilang rendah . Dari sudut pandang masyarakat, dukungan terhadap pendidikan anak perempuan belum merata. Sebagian besar masyarakat mendukung anak perempuan untuk mencapai pendidikan setinggi mungkin , namun ada juga yang berpikir kurang bermanfaat karena dianggap tidak terlalu penting untuk kehidupan rumah tangganya. Dukungan lebih besar yang diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan seringkali dianggap cukup menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah SMP dan SMA saja [11], [12]. Sementara itu , pemerintah desa belum memiliki program khusus untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak perempuan.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa bapak Junaidi, bahwa belum ada kolaborasi formal antara pemerintah desa dengan pihak sekolah untuk mengatasi masalah anak yang berhenti sekolah. Pemerintah desa hanya sebatas meminta data anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah , tanpa adanya tindakan atau kebijakan lanjutan . Kepala desa menjelaskan bahwa penyampaian informasi tentang pentingnya pendidikan biasanya hanya dilakukan secara informal dalam acara tertentu, misalnya pada acara Pembagian rapor atau pertemuan warga .

Berdasarkan hasil observasi tempat-tempat umum yang mendukung pembelajaran, seperti perpustakaan daerah, tempat belajar kelompok, atau kelas pengembangan keterampilan, masih belum tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum berbuat cukup dan belum melakukan segala upaya untuk memastikan anak perempuan mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945. Penting bagi kelompok dan tokoh masyarakat desa untuk terlibat dan menciptakan lingkungan yang secara konsisten dan adil mendukung pendidikan anak perempuan.

Pembahasan

Analisis mengenai pelaksanaan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 di Desa Tanjungsari menggambarkan bahwa hak atas pendidikan, terutama untuk anak perempuan, belum sepenuhnya terwujud secara substansial. Meski secara resmi negara telah menyediakan akses pendidikan melalui sekolah-sekolah sampai tingkat menengah, faktanya banyak anak perempuan di desa ini yang tidak dapat menikmati hak tersebut akibat kendala ekonomi, budaya patriarkis, dan lemahnya kebijakan dari pemerintah desa.

Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.” Akan tetapi, menurut hasil penelitian, hak ini tetap bersifat normatif dan belum sepenuhnya dapat dioperasikan di tingkat lokal. Sebagian besar responden dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa keterbatasan finansial merupakan alasan utama di balik putus sekolah. Anak perempuan lebih mudah menjadi korban dibandingkan anak laki-laki saat keluarga menghadapi tekanan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya berperan dalam memastikan keadilan akses pendidikan untuk semua warga, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dari keluarga miskin.

Selain itu, faktor budaya juga menjadi hambatan yang tak kalah signifikan [13], [14]. Banyak orang tua dan tokoh masyarakat yang masih berpegang pada keyakinan bahwa

perempuan sebaiknya tidak melanjutkan pendidikan tinggi karena akan berperan sebagai ibu rumah tangga. Budaya semacam ini membatasi pilihan hidup anak perempuan, bahkan sebelum mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dalam konteks ini, negara termasuk pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan negara di tingkat lokal belum melaksanakan fungsinya untuk mengatasi hambatan kultural yang menghalangi pemenuhan hak warga negara.

Ketentuan penerapan ini belum menghasilkan hasil yang optimal karena minimnya tindakan nyata dari desa untuk memperbaiki kondisi yang ada. Belum ada inisiatif seperti program beasiswa desa, wadah belajar, atau kerja sama dengan sekolah yang dapat memastikan pendidikan berkelanjutan bagi anak perempuan. Pemerintah desa sebatas mencatat jumlah anak putus sekolah, tanpa diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada mereka. Padahal, jika merujuk pada konsep kewajiban positif negara, pemerintah tidak hanya wajib menghargai hak warganya, tetapi juga aktif melindungi dan mewujudkannya. Hal ini dijelaskan oleh penelitian [15], yang menyoroti peran krusial desa dalam pemberdayaan perempuan, termasuk melalui pendidikan. Ketika pemerintah desa kurang mendukung pendidikan perempuan, maka memberikan hak yang tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1) terkesan hanya formalitas belaka. Penjelasan ini diperkuat oleh [16] dan [17], yang menyatakan bahwa realisasi hak pendidikan di desa sangat bergantung pada kebijakan dan program konkret yang menasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, evaluasi atas implementasi pasal ini menunjukkan bahwa kesenjangan sistemik, rendahnya pemahaman budaya, serta sikap pasif pemerintah desa menjadi kendala utama dalam merealisasikan hak pendidikan anak perempuan. Agar Pasal 31 Ayat (1) dapat diimplementasikan secara adil dan merata, diperlukan pendekatan berbasis desa yang responsif gender. Pemerintah desa harus berubah dari sekadar administrator menjadi fasilitator dan motor penggerak perubahan sosial, demi memastikan seluruh anak, termasuk perempuan, memiliki akses penuh terhadap pendidikan yang bermutu dan bermutu. Studi yang dilakukan di Desa Tanjungsari menemukan tiga poin penting: (1) banyak anak perempuan terpaksa putus sekolah karena kesulitan ekonomi, (2) nilai-nilai patriarki masih sangat mendominasi di masyarakat, dan (3) dukungan nyata dari pemerintah desa untuk pendidikan anak perempuan masih sangat minim.

Tiga poin penting ini kemudian dikaji lebih dalam dan diperkuat oleh hasil penelitian yang sudah ada.

a. Masalah Ekonomi,

sebagai penghalang utama anak perempuan berhenti sekolah sejalan dengan penelitian [18] dan [19]. Mereka menyoroti bahwa kurangnya fasilitas dan bantuan pendidikan khusus untuk perempuan membuat anak perempuan di desa lebih mudah ketinggalan. Di Desa Tanjungsari, anak perempuan dari keluarga miskin memilih keluar dari sekolah agar tidak membebani orang tua. Hal ini memperkuat pendapat Rustina bahwa tanpa bantuan seperti beasiswa desa, kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan sulit dihilangkan di tingkat desa.

b. Soal Budaya

patriarki yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi istri dan ibu [20], [21], wawancara menunjukkan banyak orang tua di Tanjungsari merasa pendidikan tinggi tidak penting bagi anak perempuan. Ini mirip dengan temuan [18] yang meneliti budaya serupa di Desa Gogodeso. Mereka bilang pendidikan perempuan harus dipandang sebagai hak dan cara mengubah budaya patriarki. Di Tanjungsari, penelitian menemukan bukan hanya budaya yang membatasi, tapi juga belum ada usaha terstruktur untuk melawannya jadi model penting seperti “sekolah perempuan” yang mereka sarankan.

c. Lemahnya Peran Pemerintah Desa

peran pemerintah desa juga menjadi masalah utama. Pemerintah desa di Tanjungsari hanya mencatat anak-anak yang berhenti sekolah, tanpa ada tindakan nyata seperti

beasiswa, kerja sama dengan sekolah, atau forum untuk memberdayakan perempuan. Sejalan dengan penelitian [15] yang menunjukkan bahwa tidak adanya kebijakan khusus dari desa menjadi penyebab utama lambatnya pemberdayaan perempuan, termasuk dalam pendidikan. Mereka menekankan bahwa terpenuhinya hak perempuan sangat tergantung pada kesadaran kepala desa dan stafnya untuk menjadikan perempuan sebagai bagian penting dari pembangunan.

Jika kita berhubungan dengan gagasan [22] tentang model pemberdayaan ideal perempuan dalam pembangunan desa, temuan penelitian ini justru menyoroti bahwa Desa Tanjungsari belum menjadikan perempuan, terutama anak perempuan, sebagai elemen krusial dalam perutusan menuju kebijakan desa. Tidak ada wadah, baik formal maupun informal, bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pendidikan. Padahal, penelitian Setyowati menekankan bahwa tanpa adanya dukungan inklusif dan partisipatif, pembangunan desa akan terus condong pada bias gender.

Desa Tanjungsari menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan hak pendidikan anak perempuan masih minim. Masyarakat, sebagai lingkungan sosial terdekat, seringkali justru memperkuat budaya yang menghambat akses pendidikan bagi anak perempuan. Banyak orang tua dan tokoh masyarakat masih berpendapat bahwa anak perempuan tidak memerlukan pendidikan tinggi karena pada akhirnya akan mengurus rumah tangga. Cara pandang ini mencerminkan bahwa masyarakat belum memandang pendidikan perempuan sebagai elemen esensial dari pembangunan desa.

Cara pandang umum di masyarakat semacam ini justru mengurangi semangat keluarga untuk mendukung pendidikan bagi anak perempuan. Seringkali, tekanan sosial dan norma adat lebih kuat daripada pemahaman hukum tentang pentingnya pendidikan sebagai hak dasar. Hal ini sesuai dengan penelitian [18], yang menemukan bahwa budaya patriarki masih kuat di desa dan menghambat perempuan untuk bersekolah. Mereka mengusulkan pendekatan budaya seperti "sekolah khusus perempuan " untuk melawan nilai-nilai patriarki yang mendalam.

Sebaliknya, pemerintah desa sebagai wakil negara di daerah belum berperan aktif dalam memastikan hak pendidikan anak perempuan terpenuhi. Penelitian ini mengungkap bahwa desa hanya mencatat anak putus sekolah, tanpa program lanjutan atau kebijakan khusus. Tidak ada beasiswa, kerja sama desa dan sekolah untuk membantu keluarga kurang mampu, atau wadah bagi perempuan untuk menyampaikan pendapat soal pendidikan.

Kondisi ini menunjukkan pemerintah desa masih bersifat pasif, administratif, dan belum memberdayakan masyarakat. Pada hal ini, penelitian [15] sangat relevan, karena tekanan tanggung jawab penting pemerintah desa dalam membuat kebijakan lokal yang memperhatikan kebutuhan perempuan. Jika desa hanya mengelola data, keberpihakan pada kelompok rentan tidak akan terwujud dalam tindakan nyata.

Selanjutnya [22] dalam studinya tentang optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa menyatakan bahwa pemerintah desa harus menciptakan partisipasi yang terbukadan memberdayakan, termasuk menyusun kebijakan yang mempertimbangkan hak dan kebutuhan perempuan. Namun faktanya, di Desa Tanjungsari belum ada forum perempuan, diskusi khusus tentang pendidikan anak perempuan, atau kebijakan lokal yang menjamin kesetaraan akses pendidikan.

Kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa juga ditentukan oleh temuan [7], yang menyebutkan bahwa tanpa kebijakan yang jelas, masyarakat cenderung mempertahankan budaya lama dan tidak berinisiatif meningkatkan akses pendidikan perempuan. Artinya, partisipasi masyarakat hanya bisa berubah jika ada gerakan terstruktur

dari pemerintah desa yang mengarah pada kesadaran bersama tentang pentingnya pendidikan anak perempuan sebagai investasi sosial jangka panjang.

Oleh karena itu, peran masyarakat dan pemerintah desa di Tanjungsari belum selaras dan belum terarah secara strategis untuk mendorong memberikan hak pendidikan kepada anak perempuan. Pemerintah desa perlu menjalankan fungsi promosi dan fasilitasi, serta mendorong perubahan nilai di masyarakat melalui edukasi, forum warga, pelatihan kader perempuan, dan kemitraan dengan sekolah. Sementara itu, masyarakat juga perlu diedukasi agar lebih sadar bahwa pendidikan perempuan bukan hanya hak individu, tetapi juga bagian dari pembangunan desa yang inklusif dan adil.

IV. KESIMPULAN

Sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dalam pemenuhan hak pendidikan anak perempuan di Desa Tanjungsari masih menghadapi kesenjangan yang signifikan antara jaminan konstitusional dan realitas empiris. Faktor ekonomi menjadi kendala utama yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah anak perempuan (34 dari 52 anak putus sekolah), diperparah dengan budaya patriarki yang masih ada di masyarakat yang menganggap pendidikan tinggi tidak penting bagi perempuan karena perannya sebagai ibu rumah tangga. Penerapan norma konstitusional di tingkat desa belum optimal karena tidak adanya program kerja sama yang sistematis antara pemerintah desa dan sekolah, serta kurangnya sosialisasi yang terstruktur, sehingga diperlukan intervensi nyata dari pemerintah dan sinergi berbagai pihak untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan anak perempuan secara komprehensif dan merata.

Untuk peneliti selanjutnya saya sarankan untuk melakukan penelitian yang lebih luas lagi atau membandingkan beberapa desa supaya melihat pola yang bervariasi dan menyeluruh terkait implementasi Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Sehingga penelitian ini dapat dipergunakan bahan referensi untuk peneliti kedepannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 1945.
- [2] *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. 1999.
- [3] Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Indonesia: LN.2003/NO.78, TLN NO.4301, LL SETNEG : 37 HLM, 2003. Accessed: Jul. 09, 2025. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- [4] Bappeda, *RPJMD Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023*. Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2019.
- [5] *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. 2002.
- [6] S. Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," *ALFABETA*, cv, 2019.
- [7] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, "Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd," 2014, *Thousand Oaks, CA: Sage*.
- [8] D. D. Syahputra, M. B. Bangun, and S. M. Handayani, "Budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Sustainable*, vol. 6, no. 2, pp. 608–616, 2023.

- [9] O. Trisnawati and S. Widiensyah, “Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, vol. 13, no. 2, p. 339, 2022.
- [10] D. Hyronimus, “Pendidikan anak perempuan dalam perspektif budaya patriarki (Studi pada budaya Lamaholot),” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 3, no. 1, pp. 175–186, 2023.
- [11] U. H. Sinaga, F. Rohman, and H. Endayani, “Pola Asuh Orang Tua Suku Batak Simalungun Terhadap Prestasi Akademik Anak Laki-Laki dan Perempuan,” *Kognisi: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Konseling*, vol. 1, no. 02, 2025.
- [12] S. Zulaikha, “Urgensi Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Perempuan di Desa Anjir Pasar Lama Kabupaten Barito Kuala,” *Huma: Jurnal Sosiologi*, vol. 4, no. 2, pp. 205–215, 2025.
- [13] S. Siregar, “Persepsi Orangtua Tentang Pendidikan Tinggi Bagi Anak Perempuan Di Desa Simatorkis Kec. Dolok Kab. Padanglawas Utara,” *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 2, no. 2, pp. 171–190, 2020.
- [14] Rokhmaniyah, K. C. Suryandari, S. Fatimah, and U. Mahmudah, *Anak putus sekolah, dampak, dan strategi mengatasinya*. CV Pajang Putra Wijaya, 2022.
- [15] I. Hayati, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh).,” Skripsi, Universitas Serambi Mekkah, 2021.
- [16] I. Khurun'in and R. Damayanti, *Perempuan & kebijakan publik*. Universitas Brawijaya Press, 2023.
- [17] H. Sulaiman, R. Durin, and D. Purnama, “Hak Atas Mendapatkan Kehidupan Yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima,” *Dame Journal of Law*, vol. 1, no. 1, pp. 25–44, 2025.
- [18] M. Rosyana and O. Jatiningsih, “Peran Sekolah Perempuan dalam Mereduksi Budaya Patriarki pada Keluarga Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 2, pp. 10301–10309, 2023.
- [19] G. Simbolon and B. A. Sunbanu, “Perempuan dan Budaya Patriarki terhadap Angka Putus Sekolah (Studi Kasus Di Desa Netpala, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan).,” *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 5, no. 10, 2024.
- [20] M. A. Sofyan, S. Bakhri, and C. C. Agbo, “Janda dan duda: Genealogi pengetahuan dan kultur masyarakat tentang janda sebagai pelanggaran kuasa patriarki,” *Kafaah: Journal of Gender Studies*, vol. 11, no. 2, pp. 199–214, 2021.
- [21] N. M. S. Dewi and D. H. Tobing, “Perempuan dan Patriarki: Gambaran Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Budaya Bali,” *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 7, no. 01, pp. 61–77, 2025.
- [22] Y. Setyowati, A. Giawa, and R. Marina, “Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa,” *INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN*, vol. 5, no. 1, Apr. 2022, doi: 10.24905/igj.v5i1.61.